

SKRIPSI

**PELAKSANAAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA PADA HUTAN
LINDUNG DI NAGARI BARINGIN KECAMATAN PALEMBAYAN
KABUPATEN AGAM**

Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi gelas Sarjana Hukum



OLEH :

Nurul Husni Shafira
1510111037

Dosen Pembimbing:
Frenadin Adegustara, S.H., M.S.
Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM AGRARIA DAN SDA (VIII)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020

No. Reg. 14/PK-VIII/I/2020



No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: NURUL HUSNI SHAFIRA	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tanggal Lahir: Solok/ 10 Juni 1997	f) Tanggal Lulus : 24 Januari 2020	
b) Nama Orang Tua: Agusmir	g) Predikat Lulus :Sangat Memuaskan	
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3.84	
d) Program Kekhususan : Hukum Agraria dan SDA	i) Lama Studi : 4 Tahun 6 Bulan	
e) No.Bp. : 1510111037	j) Alamat : Jl. Rajin No. 18 A Tanah Garam Kota Solok Sumatera Barat	

PELAKSANAAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA PADA HUTAN LINDUNG DI NAGARI BARINGIN KECAMATAN PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM

(Nurul Husni Shafira, 1510111037, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 98 halaman, 2020)

ABSTRAK

Hutan desa atau yang di Sumatera Barat disebut dengan hutan nagari adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat setempat di bidang kehutanan seperti diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007. Sebagian besar nagari di Sumatera Barat mengurus hak pengelolaan hutan desa untuk mempertahankan hak ulayat masyarakatnya. Untuk mendapatkan hak pengelolaan tersebut, pemerintah nagari harus mengajukan permohonan sesuai dengan pengaturan PermenLHK Nomor 83 Tahun 2016. Setelah dikeluarkan SK Menteri yang memberikan hak pengelolaan hutan desa barulah dapat dilaksanakan hak pengelolaan hutan desa oleh LPHN. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pelaksanaan hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung di Nagari Baringin Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam (2) implikasi pelaksanaan hak pengelolaan hutan desa terhadap hak masyarakat hukum adat di Nagari Baringin Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam. Pelaksanaan Hak Pengelolaan Hutan Desa pada Nagari Baringin ini dilakukan oleh LPHN berdasarkan hak dan kewajiban yang terdapat dalam SK Menteri Nomor : SK.3844/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017. LPHN Baringin kemudian menyusun rencana kerja berdasarkan hak dan kewajiban tersebut untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2028. Pelaksanaan ini terbagi dalam 5 (lima) bidang yaitu : 1) Konservasi serta perlindungan dan pengamanan hutan, 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, 3) Pemanfaatan kawasan, 4) Pemanfaatan jasa lingkungan, dan 5) Pemanfaatan di luar kawasan. Pelaksanaan ini masih belum terealisasi sepenuhnya karena masalah sumber daya manusia, kelembagaan dan pembiayaan. Walaupun belum terlaksana seluruhnya, pelaksanaan HPHD ini memberikan implikasi kepada hak ulayat masyarakat Nagari Baringin. dengan adanya hak dan kewajiban dalam SK Menteri tersebut memberikan pengakuan kepada sebagian hak ulayat masyarakat yang tidak bertentangan dengan fungsi lindung hutan sehingga memungkinkan masyarakat terlibat sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan hak pengelolaan hutan desa di Nagari Baringin ini belum terlalu signifikan karena LPHN belum terlalu melibatkan masyarakat. Hal ini menyebabkan belum adanya peningkatan kesejahteraan terhadap kehidupan masyarakat nagari walaupun telah adanya HPHD.

Kata Kunci : Hak Pengelolaan Hutan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Hak Ulayat

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

TandaTangan	1.	2.
Nama terang	Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.	Titin Fatimah, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : **Gusminarti, S.H., M.H.**

TandaTangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	TandaTangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	TandaTangan: